

PENGARUH ASPEK PERSONAL DAN ASPEK SISTEM TERHADAP KUALITAS

LAPORAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Komparatif Pada Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Banyumas)

Priyo Adi Wiguno

Email : priyoadi48@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

This study aims to examine the effect (1) The effect of human resource competence on the quality of regional financial reporting, (2) The effect of utilization of information technology on the quality of regional financial reporting, (3) The effect of internal control to the quality of regional financial reporting, (4) The effect of the implementation of local financial accounting system on the quality of regional financial reporting, (5) The effect of human resource competences on the quality of regional financial reporting through the implementation of local financial accounting system, (6) The effect of utilization of information technology to the quality of regional financial reporting through the implementation of local financial accounting system, (7) The effect of internal control to the quality of regional financial reporting through the implementation of local financial accounting system, (8) The differences in the effect of aspect of personal and aspect of system on the quality of regional financial reporting in Cilacap and Banyumas Regencies.

The type of data used in this study is the primary data. The research was conducted by distributing questionnaires to every local government organization (OPD) in Cilacap and Banyurnas Regencies. The analysis of this research is using multiple regression analysis, path analysis and the Chow test with SPSS 15.0 program.

The result of the research shows that: The competence of human resources, the utilization of information technology and the implementation of local financial accounting system have a significant effect on the quality of regional financial reporting. Internal control does not significantly effect the quality of regional financial reporting. The implementation of local financial accounting system mediates the effect of human resource competence and utilization of information technology on the quality of financial reporting, while the implementation of regional financial accounting system does not mediate the effect of internal control on the quality of local financial reporting. There is a difference of effect of aspect of personal and aspect of system on the quality of regional financial reporting in Cilacap and Banyumas Regencies.

Keywords: Quality of Regional Financial Reporting, Human Resources, Information Technology, Internal Control, Local Financial Accounting System

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki wilayah geografis luas terbagi menjadi kepulauan-kepulauan. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki beragam suku dan budaya, namun tetap menjunjung Bhineka Tunggal Ika, sesuai dengan landasan Negara Indonesia yaitu Pancasila terutama sila ke-3 tentang persatuan Indonesia. Dalam sila ke-5

yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan disebutkan didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang memajukan kesejahteraan umum, maka seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkannya. Dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, pemerintah merubah sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan undang-undnag tersebut pemerintah pusat memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Diharapkan dengan adanya desentralisasi setiap daerah semakin efisien dan efektif dalam mengelola proses pembangunannya karena daerah telah diberikan wewenang dan kebebasan yang luas oleh pemerintah pusat untuk mengatur kebijakan-kebijakan penting demi kemajuan daerahnya. Pelaksanaan Otonomi Daerah akan memberi dampak lebih baik terhadap layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat (publik).

Penyusunan laporan dalam Al-Quran juga tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dengan jujur tanpa mengurangi ataupun melebih-lebihkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penggunaan anggaran maka dalam setiap kegiatan transaksi harus dicatat sehingga akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan akan tercapai. Laporan keuangan adalah sebuah laporan yang dibuat secara terstruktur yang berkaitan dengan posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh entitas pelaporan

Fenomena tentang peningkatan kualitas LKPD pada setiap tingkat pemerintahan, seperti pada pemerintahan Kabupaten yang mengalami peningkatan cukup signifikan dimana

LKPD yang mendapat opini WTP di tahun 2011 sebesar 9% menjadi 65% pada tahun 2015 ini berarti terjadi peningkatan sebesar 56%. Namun tidak semua mengalami peningkatan, seperti yang terjadi pada LKPD pemerintah Kabupaten Cilacap yang tidak mengalami peningkatan selama 5 tahun mendapat opini WDP dari BPK, berbeda dengan LKPD pemerintah Kabupaten Banyumas yang tetap mempertahankan opini WTP selama 5 tahun berturut-turut. Berdasarkan hasil audit BPK tentang kualitas laporan keuangan, maka peneliti memutuskan untuk meneliti pada OPD di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas dengan pertimbangan adanya perbedaan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini untuk menguji pengaruh aspek personal dan aspek sistem yang dimana aspek personal disini adalah kompetensi sumber daya manusia sedangkan aspek sistem terdiri dari teknologi informasi, pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan daerah, apakah ada keterkaitan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini juga menjadikan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel intervening dan juga menguji perbedaan pengaruh aspek personal dan aspek sistem di dua Kabupaten yaitu: Cilacap dan Banyumas.

TINJAUAN PUSTAKA

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan memiliki prinsip utama berupa hubungan kerja antara dua pihak yaitu pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) dalam suatu bentuk kerja sama yang dinamakan dengan “*nexus of contract*”. Agen berperan sebagai pihak yang diberikan kontrak oleh *principal* untuk bekerja sesuai dengan kepentingan *principal*. Teori keagenan dapat diartikan dimana adanya suatu hubungan

diantara 2 pihak yaitu *principal* dan agen yang diperintah untuk suatu pekerjaan atau jasa dalam suatu kontrak yang mengatasnamakan *principal* dan memberikan kebebasan penuh untuk agen dalam menentukan kebijakan yang bermanfaat bagi *principal* (Jensen dan Meckling, 1976).

Stewardship Theory

Teori *stewardship* adalah teori yang menjelaskan kondisi dimana manajer tidak berkeinginan untuk memenuhi tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih fokus untuk tujuan utama mereka yaitu mendahulukan kepentingan organisasi. Teori ini memiliki akar psikologi dan sosiologi yang dibuat untuk menjelaskan situasi dimana para manajer yang berperan sebagai *steward* akan bekerja sesuai dengan kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1991). Pada *stewardship theory, model of man* didasarkan pada steward yang dibentuk untuk selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, mempunyai perilaku kolektif dan selalu bersedia untuk melayani. Pada saat terjadi perbedaan tujuan diantara kedua pihak, maka steward akan lebih memilih untuk bekerja sama daripada menentangnya dikarenakan steward lebih mempertimbangkan tercapainya tujuan utama organisasi.

Kualitas Laporan Keuangan

Definisi laporan keuangan adalah suatu bentuk laporan dari segala aktivitas transaksi yang telah dilakukan dalam periode waktu tertentu. Pembuatan laporan keuangan bertujuan untuk membagi informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang memiliki pengaruh terhadap kepentingan umum. Dibuatnya laporan keuangan itu sendiri harus mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan keputusan baik itu keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Laporan keuangan dikatakan baik dan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 antara lain:

- 1) Relevan, yaitu informasi yang terkandung dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna sehingga membantu dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini maupun masa depan. Terdapat unsur-unsur dari informasi yang relevan, antara lain:
- 2) Andal, merupakan suatu bentuk penyajian informasi yang bebas dari unsur penyesatan dan kesalahan salah saji material. Karakteristik andal antara lain:
- 3) Dapat dibandingkan, adalah suatu bentuk perbandingan antara periode sekarang dengan periode sebelumnya, maupun dibandingkan dengan organisasi lain yang bergerak di bidang yang sama.
- 4) Dapat dipahami, adalah pengguna mampu memahami isi dari laporan keuangan dengan baik.

Sumber daya Manusia

Kebutuhan akan adanya sumber daya manusia dalam setiap jenis pekerjaan sangat penting dikarenakan pada setiap bagian dari pekerjaan itu sendiri pasti membutuhkan adanya sumber daya manusia. Jadi kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan utama organisasi.

Terdapat tiga komponen utama dalam membentuk kompetensi menurut Hutapea dan Thoah(2008), yaitu :

- 1) Pengetahuan (*knowledge*) merupakan tingkat pengetahuan seseorang dalam bidang kompetensi yang dimiliki sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya.
- 2) Keterampilan (*skill*) adalah upaya yang dilakukan seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kemampuan terbaiknya.
- 3) Sikap (*attitude*) adalah pola tindakan seseorang karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajiban tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi (TI) merupakan suatu teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah data, mendapatkan, memproses, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara sehingga dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan baik untuk keperluan pribadi, bisnis maupun pemerintahan dan merupakan suatu informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. TI meliputi diantaranya komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan internet, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi yang berhubungan dengan teknologi.

Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 tentang sistem pengendalian intern pemerintah bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang intergal pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi

Dalam PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 juga dijelaskan bahwa unsurunsur pembentuk Sistem Pengendalian Intern (SPI) antara lain

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi, dan
- e. Pemantauan Pengendalian Intern

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Nordiawan (2008) sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) yang dilakukan baik secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam sebuah organisasi dikarenakan setiap lini dari organisasi pasti membutuhkan sumber daya manusia. Dalam melakukan pekerjaannya tentunya harus mempunyai kompetensi sesuai bidangnya. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki individu atau seseorang dalam suatu organisasi (kelembagaan) untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Begitu juga dalam pembuatan laporan keuangan daerah, diperlukan sumber daya manusia yang memang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi. Dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Penelitian sebelumnya oleh Andini dan Yusrawati (2015) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Sari (2014) dan penelitian Roviyantie (2011) juga menunjukan hasil adanya pengaruh yang signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat meliputi diantaranya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mempermudah dalam akses pelayanan publik oleh masyarakat (Hamzah, 2009). Penggunaan komputer, *software* atau perangkat lunak lainnya yang sejenis secara optimal merupakan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hal ini komputer memiliki peran yang penting dalam membantu peningkatan kualitas informasi dikarenakan komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan dibandingkan dengan sistem manual.

Penelitian tentang pengaruh dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah pernah dilakukan oleh Setiawati dan Sari (2014) hasilnya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Anggraeni dan Riduwan (2014) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Apabila teknologi informasi dimanfaatkan secara optimal dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

H₂ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pengendalian intern meliputi diantaranya organisasi, metoda dan ukuran-ukuran yang bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi dalam mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Masih

ditemukannya kecurangan dan penyimpangan di dalam laporan keuangan daerah oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan daerah, BPK memberikan opini tidak wajar, tidak memberikan pendapat maupun wajar dengan pengecualian diantaranya disebabkan masalah pada sistem pengendalian intern yang masih lemah yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan,2016).

Pengendalian intern yang lemah dapat mengakibatkan tidak dapat mendeteksi kecurangan-kecurangan dalam proses akuntansi. Semakin kuat pengendalian intern yang dilakukan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Primayana, dkk., (2014) menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan dari pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Penelitian Udiyanti dkk., (2015) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Penelitian Setiawati dan Sari (2014) juga menunjukkan hasil pengaruh yang positif dari pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Yendrawati, Reni (2013) yang menunjukkan hasil bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

H₃ : Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran belanja daerah (APBD) yang dilakukan baik

secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer (Nordiawan,2008). Sementara menurut Mahmudi (2010) mengutarakan bahwa sistem akuntansi pemerintah yang disusun untuk menjamin bahwa siklus akuntansi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan dan masalah, sebab apabila terdapat masalah pada salah satu siklus akuntansi tersebut dapat berakibat pada laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Apabila sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) diterapkan pada pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, begitu juga sebaliknya, apabila tidak diterapkan dengan aturan maka laporan keuangan yang di hasilkan tidak berkualitas. Penelitian Andini dan Yusrawati (2015) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian dari Roviyantie (2011) dan Rahayu, dkk., (2014) juga terdapat pengaruh signifikan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

H₄ : Penerapan sistema akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Suatu organisasi dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan utamanya sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan dari sumber daya manusia yang berada di dalamnya. Dalam oragnisasi sektor publik, peran sumber daya manusia lebih ditekankan pada kemampuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi yang baik dimata masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghasilkan pelayanan yang baik dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik dari level pimpinan maupun staf pemerintahan.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat dalam penggunaan APBD, selain dengan memberikan pelayanan publik yang baik juga membuat laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Menurut Warisno (2008), sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah yang gagal dalam memahami serta menerapkan logika akuntansi dapat berdampak pada kekeliruan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi maka tidak akan kesulitan dalam menerapkan sistem akuntansi yang ada. Semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki akan berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

H₅ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui Penerapan Sistem akuntansi Keuangan Daerah.

Menurut Zeyn (2011), keakurasian angka-angka yang tertera di laporan keuangan dihasilkan oleh sistem akuntansi yang memadai untuk akuntabilitas pelaporan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas, tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri memiliki ruang lingkup yang mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur akuntansi dan teknologi informasi.

Tentunya dalam setiap pemerintahan daerah memiliki sarana teknologi informasi, akan tetapi sarana tersebut sudah sesuai kebutuhan atau belum, sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Dengan mempunyai teknologi informasi yang baik maka akan berdampak positif dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, karena semakin baik teknologi

informasi yang ada dapat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan sistem akuntansi yang ada.

H₆ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah melalui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Pengendalian intern dibutuhkan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi 2005). Penyimpangan yang terjadi dalam laporan keuangan mengindikasikan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik kualitatif keterandalan dan relevan. Penyebab dari ketidakandalan dalam laporan keuangan merupakan masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern dalam organisasi (Hevesi, 2005).

Menurut Mardiasmo (2002), sistem akuntansi keuangan daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal, relevan dan dapat dipercaya. Namun apabila sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterapkan lemah menyebabkan pengendalian intern juga menjadi lemah pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan kurang andal dan relevan digunakan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain apabila pengendalian intern itu kuat maka dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah juga semakin kuat sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

H₇ : Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

Perbedaan pengaruh aspek personal dan aspek sistem terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kabupaten Cilacap dan Banyumas.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual. Pemerintah selaku regulator mencanangkan penerapan SAP berbasis akrual mulai 1 Januari 2015 untuk seluruh pemerintah daerah. Hal itu berarti kabupaten Cilacap dan Banyumas juga sudah menerapkan SAP berbasis akrual, akan tetapi kabupaten Banyumas menerapkan peraturan ini pada Tahun 2014 satu tahun lebih awal dari waktu yang ditetapkan Pemerintah.

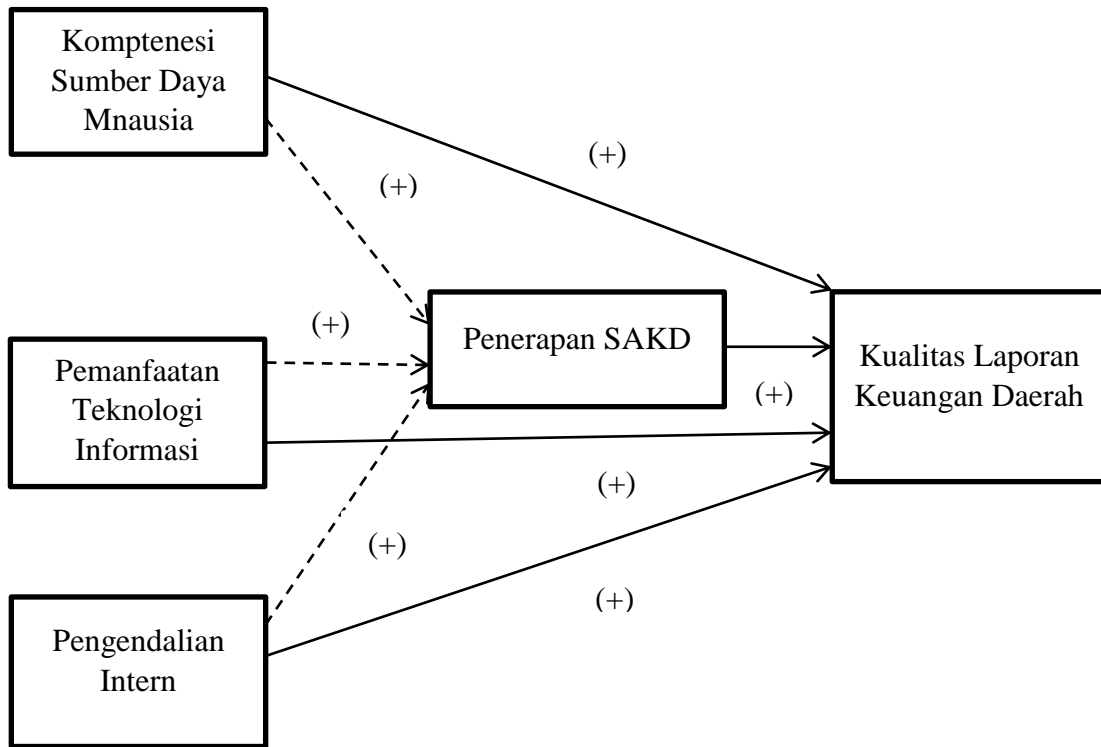
Tentunya dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 baik pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas memiliki satu pedoman dalam penyusunan laporan keuangan daerah, dengan menggunakan satu pedoman peraturan yang sama maka seharusnya laporan keuangan yang dihasilkan dari kedua Kabupaten mendapatkan opini yang sama dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Akan tetapi dari hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas laporan keuangan kedua Kabupaten menunjukkan hasil opini yang berbeda yang dimana Kabupaten Cilacap mendapatkan opini WDP sedangkan Kabupaten Banyumas mendapatkan opini WTP.

Hal ini menunjukkan bahwa antara kabupaten Cilacap dan Banyumas meskipun sudah menerapkan SAP berbasis akrual akan tetapi terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kualitas LKPD berbeda. Melihat dari hasil opini BPK atas LKPD antara kabupaten Cilacap dan Banyumas diasumsikan bahwa dari hasil uji kesamaan koefisien pada penelitian ini hasilnya terdapat perbedaan pengaruh aspek personal dan aspek sistem di kabupaten Cilacap dan Banyumas.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₈ : Terdapat perbedaan pengaruh aspek personal dan aspek sistem terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Cilacap dan Banyumas

Model Penelitian



Gambar 2.1

Model Penelitian Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan teknologi Informasi, Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai Variabel Intervening.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terdapat di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas. Sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah seluruh staff/pegawai yang bekerja di OPD Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas pada saat penelitian ini dilaksanakan. Teknik yang dipakai dalam

penentuan sampel adalah teknik *purposive sampling*. Dimana pengertian dari *purposive sampling* adalah penentuan sampel atas dasar pertimbangan tertentu. tertentu disini yaitu orang yang dianggap paling kompeten tentang hal yang menjadi tinjauan atau obyek dalam penelitian ini. Responden penelitian ini adalah pegawai OPD dengan kriteria responden sebagai berikut:

- a. Pegawai yang bekerja di organisasi pemerintah daerah (OPD) Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas.
- b. Pegawai pengelola keuangan daerah beserta stafnya di organisasi pemerintah daerah (OPD) Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas.

Berikut merupakan daftar nama OPD :

Tabel
Daftar Nama OPD

No	Nama instansi di kabupaten Cilacap	Nama instansi di kabupaten Banyumas
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Dinas Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masayarakat dan Desa
4	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
5	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum
7	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Nama instansi di kabupaten Cilacap	Nama instansi di kabupaten Banyumas
8	Dinas Pangan dan Perkebunan	Dinas Pertanian
10	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan Daerah
11	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan menyebar kuisisioner dikabupaten, yang ditunjukkan kepada responden untuk setiap OPD. Peneliti menyerahkan kuesioner dan mengambil kembali kuesioner tersebut sesuai dengan perjanjian pada saat menyebar kuesioner.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependen (Kualitas Laporan Keuangan Daerah)

Peraturan pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan bagian kerangka konseptual akuntansi pemerintahan “karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan meliputi : (relevan, dapat dibandingkan, andal, mudah dipahami/dapat dipahami). Pengukuran variabel dependen ini diukur dengan instrument yang telah dikembangkan dari peraturan pemerintah No 71 pada tahun dengan 10 pertanyaan.

Variabel independen

Sumber daya manusia

.Kompetensi sumber daya manusia adalah bagaimana seorang individu mampu menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan *skill* yang dimiliki. Kompetensi dinilai dari kemampuan dalam mencapai kinerja dalam menghasilkan *output dan outcome*. Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah instrument pertanyaan yang dikembangkan oleh Andini dan Yusrawati (2015), dengan 9 pertanyaan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat terdiri dari komputer, *software*, data base, jaringan internet, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang masih berhubungan dengan teknologi. Pemanfaatan ini merupakan sejauh mana perilaku karyawan dalam menggunakan teknologi informasi dalam tugasnya. Variabel ini diukur dengan instrument pertanyaan yang dikembangkan oleh Setiawati dan Sari (2014), dengan 7 item pertanyaan

Pengendalian Internal

Pengendalian internal memiliki peran penting juga dalam pencapaian tujuan dalam organisasi pemerintah, dengan mengontrol segala kegiatan yang dilakukan supaya tidak

keluar dari tugas yang semestinya dikerjakan. Variabel ini diukur dengan instrument pertanyaan yang dikembangkan oleh Setiawati dan Sari (2014), dengan 9 item pertanyaan.

Variabel Intervening (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang didefinisikan sebagai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan mulai dari pengumpulan data, pencatatan sampai dengan pengikhtisaran sebagai tanggung jawab dari penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Maka dari itu sistem akuntansi keuangan daerah harus diterapkan dalam pembuatan laporan keuangan daerah. Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diukur dengan penelitian yang dikembangkan oleh penelitian Andini dan Yusrawati (2015), dengan 8 pertanyaan.

Pengujian Instrumen

Pengujian Intrumen akan diuji dengan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian data dengan menggunakan aplikasi SPSS 15.

Pengujian asumsi klasik

Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, terdapat dua kali regresi sebagai berikut:

$$Z = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Y_1 + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Selain itu penelitian ini menggunakan uji path analysis untuk mengetahui pengaruh tidak langsung dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan dalam penelitian ini juga menggunakan uji chow untuk menguji perbedaan pengaruh aspek personal dan aspek

sistem terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	120
Kuesioner yang kembali	100
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0
Respons Rate	83.3%

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui mengenai tingkat pengembalian, dari 120 kuesioner yang disebar, sebanyak 100 kuesioner diterima kembali, sedangkan kuesioner yang tidak dapat diolah tidak ada sehingga semua kuesioner dapat diolah. Kemudian data yang diperoleh telah memenuhi syarat asumsi klasik, sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KLKPD	100	36	50	41,89	4,204
SDM	100	29	45	36,82	3,374
TI	100	20	35	28,31	3,628
PI	100	26	45	34,67	4,346
SAKD	100	29	40	34,14	3,197
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Primer Yang Diolah,, 2017

Tabel diatas menjelaskan mengenai besar jumlah jawaban yang diberikan responden dalam setiap variabel, untuk variabel dependen KLKPD (Z) jumlah minimum yang diperoleh sebesar 36, nilai maksimum 50, nilai rata-rata responden menjawab sebesar 41,89 dan nilai Standar deviation sebesar 4,204. Untuk variabel independen kompetensi SDM (X1) jumlah

minimum yang didapat sebesar 29, nilai maksimum 45, nilai rata-rata responden menjawab dengan jumlah sebesar 36,82 dan nilai standar deviation sebesar 3,374. Sedangkan untuk variabel independen TI(X2) jumlah minimum yang didapat sebesar 20, nilai maksimum 35, nilai rata-rata responden menjawab dengan jumlah sebesar 28,31 dan nilai. Standar deviation sebesar 3,628.

Sedangkan untuk variabel independen PI (X3) jumlah minimum yang didapat sebesar 26, nilai maksimum 45, nilai rata-rata responden menjawab dengan jumlah sebesar 34,67 dan standar deviation dengan nilai sebesar 4,346. Untuk variabel intervening SAKD (Y) jumlah minimum yang diperoleh sebesar 29, nilai maksimum 40, nilai rata-rata responden menjawab dengan jumlah sebesar 34,14 dan standar deviation sebesar sebesar 3,197.

Hasil Uji Validitas

pertanyaan	r hitung					r tabel	ket
	Z (KLKD)	H ₁ (SDM)	H ₂ (TI)	H ₃ (PI)	Y (SAKD)		
1	0,597	0,577	0,860	0,561	0,547	0,196	valid
2	0,804	0,572	0,730	0,697	0,802	0,196	valid
3	0,807	0,646	0,722	0,725	0,875	0,196	valid
4	0,650	0,585	0,778	0,785	0,829	0,196	valid
5	0,842	0,524	0,868	0,820	0,840	0,196	valid
6	0,733	0,555	0,878	0,645	0,768	0,196	valid
7	0,813	0,657	0,675	0,652	0,917	0,196	valid
8	0,733	0,753		0,711	0,913	0,196	valid
9	0,805	0,703		0,550		0,196	valid
10	0,870					0,196	valid

Berdasarkan tabel diatas, seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner baik variabel dependen (kualitas laporan keuangan daerah), variabel independen (sumber daya manusia, teknologi nformasi, pengendalian intern) dan variabel intervening (sistem akuntansi keuangan daerah) seluruhnya dikatakan valid karena nilai r hitung > r tabel.

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ukuran	Keterangan
KLKD (Y)	0,899	>0,70	Reliable
SDM (X1)	0,785	>0,70	Reliable
TI (X2)	0,882	>0,70	Reliable
PI(X3)	0,856	>0,70	Reliable
SAKD(X4)	0,917	>0,70	Reliable

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian reliable karena nilai dari *Cronbach's Alpha* > 0,70.

Pembahasan Hasil Penelitian

Uji t Regresi 1

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,400	2,204		3,812	,000
	SDM	,355	,075	,375	4,753	,000
	TI	,564	,069	,640	8,199	,000
	PI	-,095	,063	-,130	-1,503	,136

a Dependent Variable: SAKD

Tabel 4.20
Hasil Uji t Regresi 2

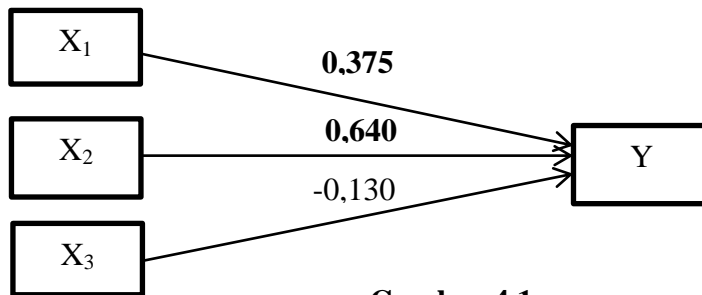
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,033	1,556		-1,307	,194
	SDM	,133	,055	,107	2,430	,017
	TI	,296	,059	,255	5,010	,000
	PI	,027	,042	,028	,648	,518
	SAKD	,870	,067	,662	12,955	,000

a Dependent Variable: KLKPD

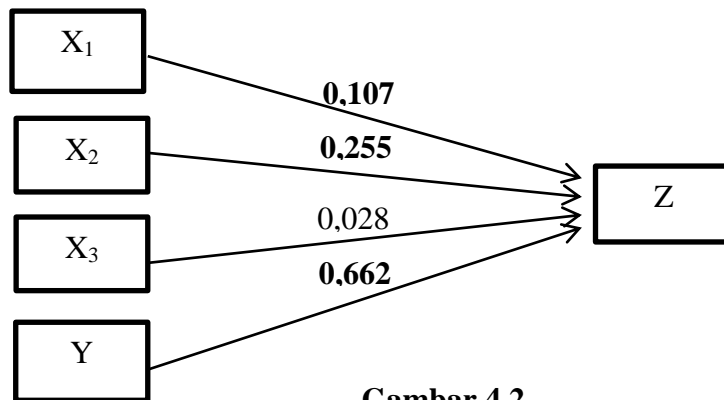
Hasil Uji Path Analysis

➤ Regresi Tahap 1

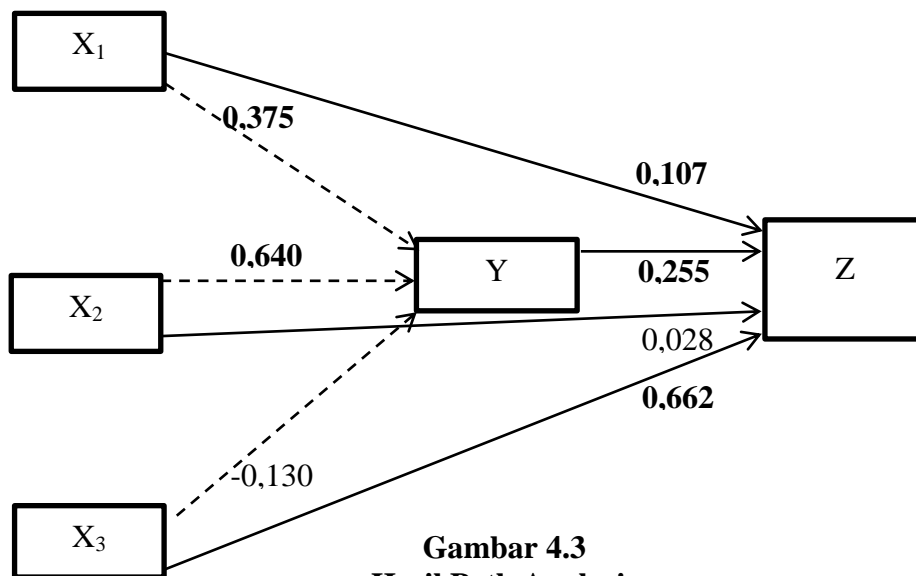


Gambar 4.1
Hasil Koefisien Jalur Regresi 1

➤ Regresi Tahap 2



Gambar 4.2
Hasil Koefisien Jalur Regresi 2



Gambar 4.3
Hasil Path Analysis

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan individu untuk dapat menyelesaikan tugas serta kewajibannya dalam bekerja untuk mencapai tujuan utama yang telah di tentukan dalam organisasi dengan cepat dan tepat. Adanya sumber daya manusia di suatu organisasi ataupun pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta mampu untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas baik. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang berarti hasil penelitian untuk hipotesis pertama (H_1) diterima. Berpengaruhnya variabel sumber daya manusia menunjukkan bahwa semakin berkompotennya sumber daya manusia yang dimiliki maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik.

Sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai bidangnya dalam hal ini berarti bidang akuntansi, mempunyai pengetahuan, mempunyai keterampilan dan juga sikap yang baik dalam bekerja akan berdampak pada semakin berkualitasnya laporan keuangan daerah. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015). Setiawati dan Sari (2014) dan Roviyantie (2011) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Teknologi yang memberikan manfaat pada pekerjaan manusia diantaranya dipakai untuk memperoleh data, memproses, menyusun serta menyajikan data sehingga menghasilkan kualitas informasi yang baik merupakan pengertian dari teknologi informasi.

Peran dari teknologi informasi tentunya sangat dibutuhkan dalam setiap organisasi termasuk dalam instansi pemerintah, teknologi informasi dapat digunakan dalam bertukar informasi data maupun dalam menyusun laporan keuangan yang dimana akan membantu sumber daya manusia sehingga dapat mengurangi biaya, tenaga dan waktu. Hasil dari pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang berarti hasil penelitian untuk hipotesis kedua (H_2) diterima.

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam beberapa cara seperti pemakaian komputer, jaringan internet, pemakaian *software* maupun perangkat lunak sejenis secara maksimal sehingga dapat membantu dan mempercepat pekerjaan dalam meningkatkan kualitas informasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Setiawati dan Sari (2014), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menunjukkan hasil bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Anggraeni dan Riduwan (2014).

Pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengendalian internal memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan dalam organisasi pemerintah, jadi setiap kepala bagian memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja dari masing-masing OPD, karena dalam setiap OPD memiliki perbedaan visi, misi tujuan, sehingga kepala OPD sangat berperan penting dalam mengawasi dan mengontrol instansi pemerintah yang dipimpin supaya tujuan dari instansi pemerintah tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang berarti hasil penelitian untuk hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Yendrawati,Reni (2013) yang membuktikan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini kemungkinan karena walaupun pengendalian internal yang diterapkan sudah baik dan kuat akan tetapi apabila belum diterapkan secara efektif menyebabkan kualitas laporan yang dihasilkan kurang baik. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Primayana, dkk., (2014), Udiyanti, dkk.,(2015).

Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan baik secara manual maupaun menggunakan aplikasi komputer. Hasil pengujian hipotesis keempat, menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang berarti hasil penelitian untuk hipotesis keempat (H_4) diterima.

Sistem akuntansi yang lemah dapat mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk pengambilan keputusan. Apabila sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan pada pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015), Roviyantie (2011) dan Rahayu, dkk., (2014) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

Sumber daya manusia memang sangat dibutuhkan disetiap lini pekerjaan, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Hasil pengujian hipotesis kelima, melalui uji analisis jalur menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung sebesar (0,248) dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.yang berarti hasil penelitian untuk hipotesis kelima (H_5) diterima.

Hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan sistem akuntansi yang diterapkan dapat menghasilkan output berupa laporan keuangan dengan kualitas yang baik.

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

Hasil pengujian hipotesis keenam, melalui uji analisis jalur menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung sebesar (0,424) dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.yang berarti hasil penelitian untuk hipotesis keenam (H_6) diterima.

Untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik, tentunya membutuhkan saran dan prasarana yang memadai, salah satunya merupakan kebutuhan akan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi yang lengkap dan sudah digunakan secara maksimal maka akan membantu/memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan. Disamping itu adanya sistem akuntansi yang diterapkan juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian dapat diinterpretasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal dan didukung dengan adanya sistem akuntansi yang diterapkan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam, melalui hasil uji analisis jalur terdapat nilai koefisien jalur yang dimana nilai sig lebih besar dari alpha (0,05) maka dari itu tidak dilakukan uji *sobel test* untuk mengetahui pengaruh tidak langsung dari pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan. Hasil dari pengujian menunjukkan tidak ada pengaruh dari pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang berarti hasil penelitian untuk hipotesis ketujuh (H₇) ditolak.

Hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa pengendalian intern yang diterapkan dalam lingkungan pemerintah daerah masih lemah maka walaupun di dukung dengan penerapan sistem akuntansi yang sudah baik maka tidak akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, begitu pula sebaliknya apabila pengendalian intern yang diterapkan sudah kuat namun sistem akuntansi masih lemah maka juga tidak akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Uji Chow

Uji chow digunakan untuk mengetahui perbedaan dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas.

Hasil Uji Nilai Residual Cilacap (RSSR1)

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	824,430	4	206,108	188,758	,000(a)
	Residual	51,320	47	1,092		
	Total	875,750	51			

a Predictors: (Constant), SAKD, PI, TI, SDM

b Dependent Variable: KLRPD

Hasil Uji Residual Banyumas (RSSR2)

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	783,736	4	195,934	95,544	,000(a)
	Residual	88,181	43	2,051		
	Total	871,917	47			

a Predictors: (Constant), SAKD, PI, SDM, TI

b Dependent Variable: KLKPD

Hasil Uji Residual Gabungan (RSSr)

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1595,191	4	398,798	245,058	,000(a)
	Residual	154,599	95	1,627		
	Total	1749,790	99			

a Predictors: (Constant), SAKD, PI, SDM, TI

b Dependent Variable: KLKPD

Rumus Uji Chow:

$$\begin{aligned}
 F &= \frac{(RSS_r - RSSU_r)/k}{RSSU_r/(n_1+n_2-2k)} \\
 &= \frac{154,599 - (51,320 + 88,181)/4}{(51,320 + 88,181) / [52 + 48 - 2(4)]} \\
 &= \frac{154,599 - 139,501 / 4}{139,501 / 92} \\
 &= \frac{3,7745}{1,5163} \\
 &= 2,4892
 \end{aligned}$$

Keterangan:

F	=	Nilai F hitung
RSSr	=	Nilai residual dari hasil regresi gabungan
RSS1 dan RSS2		
RSS1	=	Nilai residual dari hasil regresi pertama
RSS2	=	Nilai residual dari hasil regresi kedua
RSSUr	=	RSS1 + RSS2

K	=	Variabel independen + variabel dependen –1
n1	=	Jumlah sampel RSS1
n2	=	Jumlah sampel RSS2

Dari tabel F dengan $df_1 = 4$ dan $df_2 = 96$ diperoleh nilai F pada tingkat signifikan 5% (0,05) adalah sebesar 2,47. Dikarenakan nilai F hitung (2,4892) > F tabel (2,47), maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan pengaruh aspek personal dan aspek sistem terhadap kualitas laporan keuangan daerah di kabupaten Cilacap dan di kabupaten Banyumas

Perbedaan pengaruh aspek personal dan aspek sistem terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas.

Hasil pengujian hipotesis ke delapan (H_8) menunjukkan adanya perbedaan pengaruh aspek personal dan aspek sistem terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis (H_8) diterima.

Perbedaan hasil opini audit Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu indikasi adanya perbedaan pengaruh variabel-variabel bebas penelitian ini terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Opini untuk laporan keuangan Kabupaten Cilacap dari tahun 2011-2015 selalu mendapatkan opini WDP, sedangkan opini untuk laporan keuangan Kabupaten Banyumas dari tahun 2011-2015 selalu mendapatkan opini WTP. Hal ini akan berdampak pada pengaruh variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan daerah, mengingat bahwa yang menjadi variabel dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaporan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “pengaruh aspek personal dan aspek sistem terhadap kualitas laporan keuangan daerah” adalah :

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (H_1) diterima.

2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah (H₂) diterima.
3. Pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah (H₃) ditolak.
4. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah (H₄) diterima.
5. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (H₅) diterima.
6. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (H₆) diterima.
7. Pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (H₇) ditolak.
8. Terdapat perbedaan pengaruh aspek personal dan aspek sistem terhadap kualitas laporan keuangan di kabupaten Cilacap dan kabupaten Banyumas (H₈) diterima.

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran untuk perbaikan penelitian kedepannya sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah responden sehingga data yang digunakan akan lebih kuat.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mendapatkan data dari seluruh OPD yang menjadi tempat penelitian sehingga data yang didapat dapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Andini, Dewi dan Yusrawati. 2015. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan)". *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I Vol. 24 No. 1 Juni 2015*.

- Anggraeni, D.T, dan Riduwan, A. 2014. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo)”, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi STIESIA Surabaya, Vol.3 No.3 tahun 2014*.
- BPK RI, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2016*, www.bpk.go.id diakses tanggal 22 Desember 2016 pukul 20.00.
- Dewi, N.M.R.K, Sinarwati, N.K, Darmawan, N.A.S. 2014.” Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada 10 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Jembrana)”. *E-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.2 No.1 Tahun 2014*.
- Donaldson. Lex, Davis James H, 1991 “*Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Covernance and Shareholders Returns*” *Australian Journal of Management. Vol.16 No.1 1991*
- Ghozali, I, 2011. Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, Ardi. 2009. “Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspetasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfalisitasi Pemakai terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura)”, *Kumpulan Makalah Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*.
- Hevesi, G. Alan. 2005. *Standards for Internal Control in New York State Government*.
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. Kompetensi Plus. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Naharyanto. 2008. “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”, *Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak*.
- Jensen, M.C dan W.H Meckling. 1976. “Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Sctructure”. *Journal of Financial Economics, 3: 305-360*.
- Mahmudi, 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo.2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol.2 No.1, Hal 1-17*.
- Mulyadi. 2005. “*Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*”, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPF.
- Nordiawan, Deddi. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Primayana, K.H, Atmadja, A.T, Darmawan, N.A.S. 2014. “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng)”. *E-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.2 No.1 Tahun 2014*.
- Putri, N.K.R, Darmawan, N.A.S, Werastuti, D.N.S. 2015.” Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam di kecamatan Buleleng)”. *E-Journal SI Akuntansi Universitas Ganesha, Vol.3 No.1 Tahun 2015*.
- Rahayu, L., Kennedy dan Anisma, Y. 2014.” Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris pada SKPD Provinsi Riau)”. *JOM FEKON Vol.1 Nomor.2 Oktober 2014*.
- Roviyantie, Devi. 2011. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya)”.
- Setiawati,E dan Sari, S.P, 2014.” Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Penegendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)”. *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 25 Juni 2014, ISBN: 978-602-70429-2-6*.
- Syarifudin, Akhmad. 2014.” Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemkab Kebumen)”. *Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No. 02 Desember 2014*.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Udiyanti, N.L.N.A, Atmadja, A.T, Darmawan, N.A.S. 2014. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng)”. *e-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.2 No.1 Tahun 2014*.
- Wansyah, H., Darwanis, Bakar, U. 2012.” Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD pada Provinsi Aceh”, *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume.1 No.1, Agustus 2012*.
- Warisno, 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

- Winidyaningrum, C., dan Rahmawati. 2010. “ Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN)”. *Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*.
- Yendrawati, Reni. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Faktor Eksternal sebagai Variabel Moderating. *JAAI*, Volume 17 No.2, Desember 2013: 166-175
- Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Government dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Trikonomika*, 10 (1): 52-62.